

## **BAB IV**

### **ALASAN CHINA MENGHALANGI PROSES PENANGKAPANPELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA**

Pada bab ini akan dijelaskan 3 komponen dalam geopolitik yakni wilayah, energi dan *power* yang akan menunjukkan pengaruhnya terhadap konflik China dengan Indonesia di perairan Natuna. Komponen geopolitik tersebut akan digunakan untuk menganalisa alasan atas tindakan China yang menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna. Kemudian dilengkapi dengan analisa karakter diplomasi China yang berdasar pada penggunaan kerangka teori diplomasi perompak.

#### **A. Geopolitik**

Argumen politik untuk memperoleh dan mempertahankan kedaulatan suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan bagian penting suatu negara yakni keberadaan batas-batas negara. Penentuan batas-batas wilayah telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antar negara yang berbatasan. Dalam penentuan perbatasan di wilayah perairan telah ditentukan oleh hukum laut internasional yang telah disepakati negara-negara di dunia. Apabila terjadi batas wilayah yang bertabrakan atau tumpang tindih, negara-negara yang berbatasan tersebut haruslah melakukan perjanjian yang disebut dengan delimitasi untuk menemukan kesepakatan dalam penentuan batas negara mereka yang tumpang tindih. Setelah diadakannya perjanjian kesepakatan barulah diadakannya

demarkasi. Namun akibat dari adanya perubahan geopolitik global selama beberapa decade, setidaknya seperempat dari batas-batas wilayah di seluruh dunia ini tidaklah stabil, bahkan dua pertiga dari seluruh batas-batas wilayah maritime global masih belum terselesaikan hingga kini. Dikarenakan penentuan batas-batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial bagi keamanan hingga kepentingan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, ketidak stabilan dalam geopolitik dan juga belum terselesaikannya kesepakatan batas wilayah menyebabkan terjadinya konflik terkait perbatasan antar negara. Dengan kata lain ruang wilayah telah menjadi bagian penting dalam penentu kebijakan suatu negara. Begitu juga yang terjadi dalam kasus yang kini penulis teliti yakni konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

## **1. Wilayah**

Dalam geopolitik, wilayah atau faktor geografis berperan penting untuk menjadi dasar bagi politik suatu negara, khususnya pengambilan keputusan yang bersifat politik. Negara tak dapat disebut sebagai negara apabila tidak ada wilayah yang diakui secara politis dan sah oleh dunia internasional, dimana di dalam wilayah tersebut terdapat segala sumber daya yang menjadi hak kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan wilayah dibatasi dengan batas-batas wilayah yang menjadi penanda integritas territorial suatu negara dan perpanjangan dari kekuasaan pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ewan W. Anderson, "Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places" dalam Colin S Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, (London: Frank Cass Publishers, 1999), hal. 124

Dalam komponen wilayah, salah satu sumber ancaman yang besar kemungkinan akan menyebabkan konflik di kawasan perbatasan adalah posisi dan jarak.

**a. Pengaruh Posisi dan Jarak terhadap Konflik**

Kawasan perbatasan merupakan suatu kawasan yang rawan akan konflik yang mana tidak dapat dilepaskan dari sumber ancaman yang dihadapi oleh negara. Salah satu ancaman suatu negara adalah kedekatan wilayah (*proximity*) yang sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Stephen M. Walt:

State will also align in response to threats from proximate power. Because the ability to project power declines with distance, state that are nearby pose a greater threat than those that are far away.... Small states bordering a great power may be so vulnerable that they choose to bandwagon rather than balance, especially if their powerful neighbor has demonstrated its ability to compel obedience.<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan wilayah akan mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan *power* mereka. Proyeksi *power* ini dapat berupa tindakan agresif untuk melindungi kawasan perbatasan maupun kawasan yang masih disengketakan. Jarak dari kawasan yang disengketakan sangatlah berpengaruh terhadap persepsi ancaman terhadap negara lain. Semakin dekat jarak antara kawasan yang disengketakan dengan negara pengklaim, semakin besar keyakinan atas klaim kedaulatan kawasan tersebut sehingga meningkatkan perasaan terancam. Perasaan terancam akan menjadi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 125

semakin besar apabila negara pengklaim lainnya merupakan *powerful neighbor* dengan kapasitas politik, militer dan ekonomi yang lebih besar dari negara yang bersangkutan.

Penerapan pengaruh kedekatan wilayah atau jarak terhadap suatu konflik dapat dilihat juga dalam sengketa yang penulis bahas yakni sengketa yang berlangsung di perairan Natuna antara China dan Indonesia. Dalam kasus sengketa tersebut, jarak China dan juga kawasan konflik Laut China Selatan yang diklaim China dengan perairan Natuna yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia yang berada dipaling utara sangat mempengaruhi persepsi ancaman di masing-masing negara tersebut.

Disisi Indonesia, letak kawasan perbatasan perairan Natuna yang berdekatan dengan kawasan konflik Laut China Selatan menciptakan ancaman tersendiri bagi Indonesia. Tindakan China yang gencar mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan dengan segala upaya membuat pemerintah Indonesia was-was dan siap siaga karena tidak menutup kemungkinan konflik yang tengah berlangsung di Laut China Selatan akan memberikan dampak bagi perairan perbatasan Indonesia. Seolah membenarkan kekhawatiran yang ada, Konflik di perairan Natuna pun terjadi. Hal tersebut dikarenakan China memasukkan sebagian wilayah perairan Natuna yang merupakan kawasan ZEE milik Indonesia kedalam luas wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China. Indonesia yang merasa terancam memberikan peringatan terhadap

pemerintah China dengan melakukan pertemuan dan diplomasi. Sementara dari pihak China, China bersikukuh bahwa batas wilayah Laut China Selatan memang sedemikian adanya seperti yang tergambar dalam peta *nine-dash line* yakni hingga memasuki ZEE dan landas kontinen Indonesia. China menjelaskan bahwa keberadaan kapal penjaga laut China jelas untuk membantu nelayan mereka yang tidak bersalah dari ancaman penjaga laut Indonesia. Menurut China ketidak bersalahannya nelayan China tersebut dikarenakan tindakan penangkapan ikan oleh nelayan China masih berlokasi di wilayah perikanan milik China yang disebutnya *traditional fishing ground*. Sementara itu, istilah tersebut tidak dikenal dalam UNCLOS 1982 dan istilah yang dikenal dalam UNCLOS 1982 adalah istilah *traditional fishing right* bukan *traditional fishing ground*. Karena ketidak benaran alasan tersebut, China telah melakukan pelanggaran hukum laut internasional. *Traditional fishing right* diakui dalam konteks kegiatan perikanan tradisional suatu negara yang berada dalam perairan negara kepulauan yang menjadi tetangganya.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, batas ZEE suatu negara adalah 200 mil laut dihitung dari garis pantai pulau terluarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan kawasan sepanjang 200 mil laut itu merupakan wilayah kedaulatan dari negara pantai yang bebatasan. Dalam hal penentuan batas ZEE, Indonesia sudah sejak lama menentukan batas ZEEnya berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS dan telah mendapatkan pengesahan oleh UNCLOS. Sementara

mengenai batas ZEE China, hingga saat ini China tidak pernah memberikan keterangan resmi terkait batas wilayah perairan yang sebenarnya milik China. Alih-alih memberikan ketetapan secara resmi, China justru membuat sendiri batas wilayah perairan yang dirasa milik mereka. Pembuatan batas wilayah perairan tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang mereka miliki dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. China merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga sikap China yang bersikukuh menentukan sendiri batas wilayahnya tersebutlah yang dianggap telah melanggar ketetapan UNCLOS 1982.

## **2. Energi**

Sumber daya alam telah mempengaruhi tujuan kebijakann luar negeri suatu negara dimana persediaan energi yang mencukupi sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu negara dan menjamin kualitas standar hidup warga negaranya dan isu mengenai energi dapat menjadi dasar dibuatnya perjanjian aliansi, kebijakan yang ekspansionis dan penyebab terjadinya suatu konflik antar negara. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ralf Emmers dalam tulisannya yang menyatakan bahwa konflik terkait energi akan menjadi konflik yang lebih besar apabila berkaitan dengan konflik teritorial terkait perbatasan. Sumber daya energi yang berada di kawasan sengketa perbatasan sangatlah berpotensi untuk meningkatkan intensitas dan

eskalasi konflik antar negara yang terlibat karena adanya kepentingan realis untuk memperoleh kandungan energi yang ada di kawasan tersebut.<sup>3</sup> Ralf Emmers melihat bahwa faktor energi menyebabkan permasalahan konsumsi dan produksi yang dulunya adalah masalah *low politics* menjadi *high politics* yang berkaitan dengan hubungan antar negara dan penggunaan kekuatan militer.

Masalah konsumsi dan produksi energi yang pada awalnya merupakan isu domestik yang bersifat *low politics* menjadi *high politics* karena berbenturan kepentingan dengan negara lain hingga terciptanya insiden berupa ketegangan militer seperti yang terjadi di kawasan perairan Natuna. Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan terkait pemenuhan energi yang mana ketika terjadinya kebutuhan energi yang meningkat sementara kapasitas produksi energi belum mampu mengimbangi konsumsi energi domestic suatu negara maka hal tersebut menyebabkan terciptanya dorongan untuk mengeksplorasi kawasan lain yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon yang besar seperti halnya yang dimiliki oleh perairan Natuna dan menjadi kepentingan China atas konfliknya dengan Indonesia di perairan tersebut.

#### **a. Potensi sumber daya di perairan Natuna**

Kawasan tempat berlangsungnya konflik antara China dan Indonesia adalah batas wilayah Indonesia di bagian utara yakni perairan Natuna. Kepulauan Natuna sendiri memiliki daya tarik bagi negara-negara

---

<sup>3</sup> Ralf Emmers, "The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance", *RSIS Working Paper No. 183*, (Singapura: RSIS, 30 September 2009).

lain karena potensi sumber daya alamnya yang sangat besar. Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara.

Daya tarik yang dimiliki oleh Natuna dapat dilihat dari terjadinya tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh banyak negara asing di sekitar kawasan. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa betapa menarik dan menggiurkannya nilai alam yang dimiliki oleh Natuna hingga mampu mengundang negara asing untuk datang. Terkait sumber daya perikanan yang ada di laut Natuna, kekayaan ikan di laut Natuna merupakan salah satu potensi menggiurkan yang memikat negara lain termasuk China sehingga adanya konflik yang berlangsung di laut Natuna. Nelayan China didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah yang masih merupakan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Tindakan *illegal fishing* tentunya memberikan kerugian bagi negara. Karenanya pemerintah Indonesia selalu menegakkan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara asing di perairan milik Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak segan memberikan ancaman hukuman bagi negara yang melakukan *illegal fishing* seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri Susi melakukan kebijakan penangkapan dan peledakan terhadap kapal asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Upaya Menteri Susi

tersebut bertujuan untuk memberantas mafia illegal fishing yang menguras harta kekayaan lautan Indonesia.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, sumber daya perikanan di laut Natuna mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3 % oleh Kabupaten Natuna. Selain kekayaan perikanan tersebut, terdapat pasokan energi gas alam dan minyak bumi yang melimpah di laut Natuna. Sementara itu kekayaan alam lain yang dimiliki laut Natuna adalah minyak bumi dan gas alam. Menurut data Direktorat Jenderal Migas (2010), Kabupaten Natuna yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya berada di wilayah yang memiliki kegiatan hulu minyak lepas pantai atau *block offshore* sejak tahun 1996 dengan hasil yang sangat banyak. Di kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, 5 diantaranya telah berproduksi sementara 11 lainnya masih eksplorasi. Sejak tahun 2007 kawasan blok minyak Natuna mampu menghasilkan 61.575 barrel per harinya yang terdiri dari 59.210 barrel minyak mentah dan 2.365 barrel kondensat. Selain menghasilkan minyak bumi, kawasan laut Natuna juga mempunyai cadangan gas bumi terbesar di Indonesia.<sup>4</sup>

Gas alam terkandung di ladangnya yang disebut *D-Alpha* atau yang terkenal dengan *Blok East Natuna* terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) memiliki cadangan gas yang mencapai volume

---

<sup>4</sup> Pemerintah Siapkan Strategi Pengembangan Migas di Natuna diakses dari [www.migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-siapkan-strategi-pengembangan-migas-di-natuna](http://www.migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-siapkan-strategi-pengembangan-migas-di-natuna) pada tanggal 2 Februari 2017

222 *trillion cubic feet* (TCF) dan gas hidrokarbon yang dapat diperoleh hingga sebesar 46 TCF atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak. PT Pertamina selaku salah satu investor dalam blok migas di Natuna menyebutkan bahwa produksi gas di Blok East Natuna bisa mencapai 1.000 *Million Metric Standars Cubic Feet per Day* (MMSCFD) pada tahun 2023. Jika digabungkan dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi yang terdapat hanya di blok tersebut. Jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai 6.000 triliun rupiah.<sup>5</sup>

#### **a.Kondisi energi China**

Reformasi China yang dimulai pada tahun 1978 telah membuat pertumbuhan investasi, konsumsi, dan standar hidup di China mengalami peningkatan yang signifikan. Kesuksesan China dalam mengolah perekonomiannya semenjak reformasi telah membawa negara ini menjadi salah satu negara yang berpengaruh dalam perekonomian dan perpolitikan di dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat membutuhkan faktor penopang yang kuat. Salah satu faktor tersebut adalah pasokan energi. Ketika China sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan energi domestic, negara tersebut harus mengimpor dari luar negeri. Peningkatan kebutuhan energi China membuat negara yang

---

<sup>5</sup> Tiga Program Percepatan Pengembangan Natuna diakses dari [www.migas.esdm.go.id/post/read/Tiga-program-percepatan-pengembangan-natuna](http://www.migas.esdm.go.id/post/read/Tiga-program-percepatan-pengembangan-natuna) pada tanggal 2 Februari 2017.

dulunya sebagai pengeksport bertransformasi menjadi negara pengimpor minyak bumi semenjak masa pemerintahan Jiang Zemin di tahun 1993.<sup>6</sup>

China merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika, namun memiliki cadangan minyak terbesar di Asia Pasifik. Konsumsi minyak China meningkat dan mencapai sepertiga dari konsumsi minyak seluruh dunia pada tahun 2009. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi dalam negeri, China menggunakan batubara sebagai sumber energi utamanya sebesar 71 persen dari total konsumsi energi China. Sementara minyak adalah sumber energi terbesar kedua dengan nilai 19 persen dan gas alam sebagai energi ke tiga dengan hanya menyumbang 3,4 persen dari total seluruh konsumsi energi di China.<sup>7</sup>

Pemerintah China terus berupaya untuk memaksimalkan perusahaan minyak negaranya melalui setiap perusahaan besar miliknya. Namun, kebutuhan energi China tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Akhirnya China pun melakukan impor minyak untuk kebutuhan energinya dari beberapa negara besar seperti Arab Saudi, Angola, Uni Emirat Arab dan lainnya. Pada tahun 2011, impor minyak China mencapai 50% dari total konsumsi nasionalnya.<sup>8</sup> Kawasan terbesar pengeksport minyak ke China adalah Timur Tengah, dengan persentase sebesar 52%. Saat ini China telah menjadi negara pengimpor energi terbesar di dunia dan diperkirakan

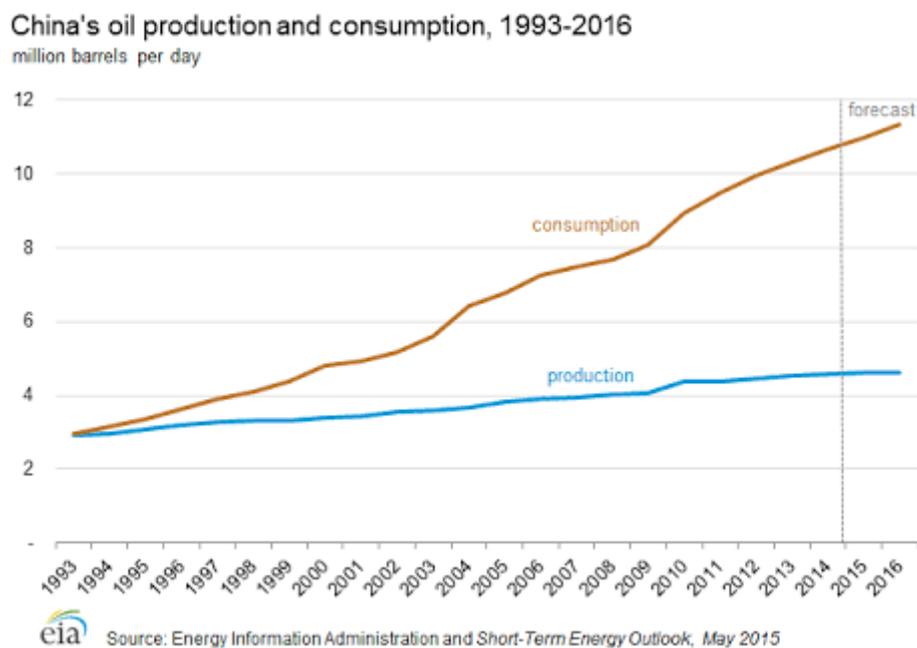
---

<sup>6</sup> Zhang Zian, *China's Energi Security: Prospect, Challenges, and Opportunities*, U.S., Brookings Institute, 2011. hal. 3

<sup>7</sup> US Energi Information Administration (US EIA), "Country Analysis Brief: China Energi Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal" (Washington: November 2010) diakses melalui [www.eia.doe.gov](http://www.eia.doe.gov) pada 9 Januari 2017.

<sup>8</sup> Zhang Zian, *Op.cit*

75% konsumsi energi China dipenuhi dengan cara impor pada tahun 2025.<sup>9</sup> Energi yang diimpor tersebut disuplai melalui jalur darat melalui Khazakstan, Rusia dan Myanmar, sementara jalur laut melalui Samudera Hindia. Dengan menjadi negara yang paling padat jumlah penduduknya di dunia dan ekonomi yang mencapai pertumbuhan cepat menjadikan China sebagai negara dengan skala konsumsi energi terbesar di dunia.



**Grafik 4.1 Jumlah Konsumsi dan Produksi China hingga 2016<sup>1</sup>**

China mengkonsumsi minyak hingga mencapai 8 juta barrel per hari (bbl/d) pada tahun 2009, sementara impor minyak yang telah dilakukan China mencapai 4,3 juta barrel per hari pada tahun 2009. Hal tersebutlah yang menjadikan China sebagai negara pengimpor terbesar kedua setelah Amerika dan melebihi jumlah konsumsi minyak jepang untuk pertama

<sup>9</sup> China Overview melalui <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN> diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

kalinya.<sup>10</sup> Pada tahun 2009 EIA telah memprediksi bahwa konsumsi minyak China akan mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Prediksi tersebut ternyata benar adanya dengan ditunjukkan pada jumlah konsumsi China sebanyak 9,6 juta barrel per hari pada tahun 2011, sementara produksi minyaknya hanya mencapai 4,2 juta barrel per hari. Kembali prediksi EIA Internasional Energi Outlook menyebutkan bahwa kebutuhan bahan bakar China akan mengalami peningkatan sebesar 17 juta barrel per hari pada tahun 2035.<sup>11</sup>

Upaya eksplorasi energi telah dilakukan oleh China akibat dari peningkatan konsumsi energi minyak di China. Eksplorasi energi tersebut dilakukan oleh perusahaan energi nasionalnya yaitu China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) di beberapa kawasan dan salah satu kawasan tersebut adalah di Laut China Selatan. cadangan hidrokarbon yang dimiliki CNOOC pada tahun 2009 adalah 957 juta boe/d. Namun nampaknya, akibat sengketa berkepanjangan yang terjadi di Laut China Selatan menyebabkan beberapa perusahaan asing yang telah bekerjasama dengan China untuk mengeksplorasi energi hidrokarbon di Laut China Selatan menghentikan pelaksanaan atas rencana tersebut.

#### **b. Pengaruh energi milik China terhadap konflik di perairan Natuna**

Kepentingan China untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat sementara kapasitas produksi energi belum mampu mengimbangi konsumsi energi dalam negeri mereka menyebabkan

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> *ibid*

terciptanya dorongan untuk mengeksploitasi kawasan yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon yang besar seperti yang ada di Laut Natuna.

Dorongan untuk mengeksploitasi energi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rasio konsumsi energi dibandingkan dengan produksi energi sehingga hasilnya akan menunjukkan apakah kapasitas produksi sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan energi negara tersebut. Untuk melihat bagaimana faktor energi berpengaruh terhadap eskalasi konflik di perairan Natuna, perlu mengukur rasio antara kapasitas konsumsi dan produksi energi China sehingga dapat menjawab seberapa besar kelangkaan energi China. Terjadinya kelangkaan energi kemudian akan menjadi penyebab keinginan ekspansi negara untuk memperoleh sumber energi baru yang nantinya akan memenuhi kebutuhan energi nasional yang tidak dapat dipenuhi secara domestic.

Jika nilai perbandingan antara konsumsi dan produksi adalah 1 maka angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi mampu dicukupi, artian nilainya juga akan sama dengan menggunakan persentase tingkat pemenuhan kebutuhan energi dengan cara pembagian jumlah produksi dengan jumlah konsumsi kemudian dikalikan dengan 100 persen. Apabila rasio antara konsumsi dan produksi bernilai lebih dari 1 atau 100% maka suatu negara tersebut surplus persediaan energi.

Rumus 
$$z = \frac{x}{y}$$
 atau 
$$z = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

$z$  = Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi

$y$  = Konsumsi

$x$  = Produksi

Dengan menggunakan rumus tersebut maka akan tergambar pemenuhan kebutuhan energi minyak China pada tahun 2009 hingga 2016 adalah:

**Tabel 4.1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Energi Minyak China.**

Tahun	Konsumsi Minyak/y (mb/d)	Produksi Minyak/x (mb/d)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi/z (%)
2009	8.5	4.0	47
2010	9.3	4.3	46.2
2011	8.9	4.3	48.3
2012	10	4.3	43
2013	10.1	4.2	41.5
2014	10.4	4.2	40.3
2015	10.9	4.3	39.4
2016	11.3	4.3	38

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa produksi minyak China dari periode 2009-2016 hanya mampu memenuhi 38 hingga 48 persen dari total jumlah konsumsi minyak tiap tahunnya. Artinya, meskipun jumlah produksi minyak China dapat dikatakan meningkat tiap tahunnya, namun

jumlah konsumsi China tiap tahunnya lebih besar mengalami peningkatan. Oleh sebabnya dari hasil olah data diatas disimpulkan bahwa kapasitas produksi minyak dalam negeri China tidak dapat memenuhi jumlah total konsumsi energi minyak China bahkan untuk mencukupi setengah atau 50% dari jumlah total konsumsi energi minyak di China. Maka dari itu, keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan energi minyak bisa jadi mendorong China untuk mengeksploitasi kawasan berpotensi sumber daya energi minyak bumi seperti halnya yang dimiliki oleh Natuna.

### 3. *Power*

Berdasar pada ungkapan Ralf Emmers bahwa *power* selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sejalan dengan pandangan bahwa politik internasional adalah *struggle power* dan *power* akan menjadi suatu hal yang ingin dituju dan dicapai. Ralf Emmers juga mengungkapkan bahwa komponen *power* dalam teori geopolitik berkaitan dengan tradisi realis yang melihat negara sebagai actor utama dalam politik internasional yang hanya berfokus untuk bertahan hidup dan meningkatkan keamanannya. Melalui sudut pandang geopolitik, *power* dianalisis dari segi militer dan strategi yang mengandung pemahaman akan adanya kekuatan koersif untuk menekan negara lain.

Terdapat beberapa definisi *power* menurut Joseph S. Nye, yaitu (1) *power* adalah kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, (2) *power* adalah kapasitas untuk melakukan hal-hal dalam situasi sosial untuk

mempengaruhi pihak lain agar memperoleh tujuan yang diinginkan , dan (3) *power* adalah sumber daya yang mampu menghasilkan apa yang diinginkan.<sup>12</sup> Dengan definisi tersebut, *power* yang berkaitan dengan kepemilikan sumber daya dalam hal ini adalah wilayah dan sumber alam akan mempengaruhi hubungan suatu negara dengan negara lain.

Negara akan mempersenjatai diri sebagai bentuk usaha untuk mencapai keamanan terhadap ancaman pihak lain atau meningkatkan kekuatan (*power*) untuk mencapai tujuan politik terhadap kepentingan negara lain.<sup>13</sup> Dengan demikian negara mempersenjatai diri untuk menghadapi anarki internasional dan ancaman luar. Dengan kata lain, kekuatan militer yang khususnya kekuatan maritime dapat digunakan untuk mencapai tujuan melalui *force*, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Penggunaan kekuatan militer secara eksplisit contoh seperti tindakan penangkapan, penembakan hingga pada pengusiran kapal asing yang berada di kawasan sengketa. Sementara penggunaan kekuatan militer secara implisit contohnya adalah dengan melakukan *naval live fire* atau latihan militer berskala besar di kawasan sengketa yang menampilkan kekuatan dalam bentuk persenjataan ofensif dengan tujuan untuk memberikan efek gentar kepada negara lainnya.<sup>14</sup>

Kapabilitas suatu angkatan khususnya angkatan laut dapat dilihat dari jenis-jenis persenjataan, jumlah persenjataan hingga jumlah pasukan angkatan laut yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Senjata terdiri dari dua

---

<sup>12</sup> Joseph S Nye, "The Future of Power", (New York: Public Affairs, 2011), hal 5-8

<sup>13</sup> Barry Buzan, *The Arms Dynamics in World Politics*, (London: Lynne Rienner. 1998), hal. 79

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 80

sifat atau jenis yakni ofensif dan defensive. Senjata ofensif merupakan senjata yang digunakan untuk menyerang. Sementara senjata defensive adalah senjata yang dapat digunakan untuk bertahan. Dalam UN Register of Conventional Arms (UNROCA) disebutkan jenis senjata yang termasuk kedalam bagian senjata untuk menyerang atau senjata ofensif adalah *Combat Aircraft, Warship (Principal Surface Combatant, Submarine, Patrol and Coastal Combatant)* dan *Missile*. Jenis-jenis persenjataan yang bersifat ofensif akan menjadi *backing* bagi suatu negara dalam mempertahankan klaimnya maupun memaksa klaim tersebut terhadap negara lawannya. Selain jenis, jumlah yang signifikan juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut akan memproyeksikan kekuatannya di kawasan angkasa yang diklaimnya.

Konflik yang berlangsung di perairan Natuna antara China dan Indonesia menjadikan kekuatan dalam bentuk persenjataan terlibat didalamnya. China menunjukkan kekuatan persenjataan militernya melalui kapal *China Coast Guard* yang menunjukkan diri ketika mengejar kapal pengawas dengan kecepatan 25 knots melintasi batas wilayah ZEE Indonesia dengan tujuan menyelamatkan nelayannya yang ditangkap oleh kapal pengawas Indonesia. China menunjukkan kekuatannya dengan menabrakkan badan CCG ke badan kapal nelayan China dan dengan mudahnya kapal nelayan yang hendak dijadikan bukti tersebut hancur tak berbentuk. Tindakan kapal CCG tersebut juga menyebabkan kapal pengawas Indonesia mengambil langkah mundur meninggalkan kapal tangkapan demi keselamatan.

## a. Perbandingan Kekuatan Alutsista Laut China-Indonesia

### 1) Kekuatan Angkatan Laut China

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang progresif selalu diikuti dengan kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan militer, begitupun yang terjadi pada China. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan kemajuan kekuatan angkatan laut China dipengaruhi oleh keberlangsungan konflik atas klaimnya di Laut China Selatan. Melalui perbaikan yang berlangsung terus menerus, pada tahun 2000 China melakukan pembelian secara besar-besaran sistem senjata baru, restruktur angkatan bersenjata, membeli kapal destroyer, kapal selam, dan peningkatan kapabilitas *amphibious* pada armadaluat selatan China atau *South Sea Fleet*.<sup>15</sup> Karenanya pada tahun tersebut China telah memiliki pesawat terbang misil, dan kapal selam berteknologi canggih, serta 17 rudal balistik antar benua, 70 rudal balistik menengah, dan 12 kapal selam yang mampu meluncurkan rudal. Rudal antarbenuanya tersebut mampu menjangkau hingga 800 km, atau dengan kata lain mampu mencapai Moskow dan pantai barat Amerika. Sejak tahun 2010, China juga telah menyebarkan rudal balistik darat yang dapat diluncurkan dengan menggunakan truk dan mampu mencapai jarak hingga 1,500 km.<sup>16</sup> Pada tahun 2009, China mengembangkan teknologi persenjataan terbaru seperti pesawat J-20, kapal selam perang, dan kapal induk. Pengembangan

---

<sup>15</sup> Ralf Emmers, *op.cit.*, hal 85

<sup>16</sup> "Kebangkitan kekuatan China di awal abad ke 21" diakses dari [www.fkpmaritim.org/kebangkitan-kekuatan-china-di-awal-abad-ke-21/](http://www.fkpmaritim.org/kebangkitan-kekuatan-china-di-awal-abad-ke-21/) pada tanggal 12 Februari 2017

tersebut bertujuan untuk memperluas keberadaannya secara fisik di kawasan Laut China Selatan. Pada akhir 2010, China berhasil membuat pesawat siluman pembom generasi ke-lima (J-20) dan pada waktu yang sama China mengakui telah memulai program pembangunan empat buah kapal induk. Selanjutnya China berencana untuk memiliki 78 kapal selam serang pada tahun 2020. Pendanaan atas pengembangan kekuatan militer tersebut, China menghabiskan dana sebesar 143 miliar dollar dan berhasil menempatkannya pada peringkat ke-2 setelah Amerika sebagai bagian dari 10 negara dengan budget pertahanan terbesar di dunia pada tahun 2011.

Salah satu alasan yang melandasi penguatan militer China saat ini adalah kepentingan untuk kembali melindungi kegiatan ekonominya yang telah ada dan merupakan sektor berpengaruh bagi kemajuan ekonomi dan industry China saat ini. Perkembangan dan kemajuan ekonomi China nantinya akan membawa dampak bagi kekuatan militernya. Saat ini China telah mampu memproduksi sendiri peralatan serta persenjataannya, hal tersebut dapat dilihat dari China telah menjadi negara pengekspor peralatan militer seperti pesawat tempur dan lainnya ke sejumlah negara. Hingga kini China pun masih terus bergerak untuk memodernisasikan peralatan perangnya.

Secara singkat, kapabilitas maritime China dapat dilihat dari alutsista<sup>17</sup> dibagian perairan yang dimiliki China hingga tahun 2016 dan dirumuskan kedalam sebuah table sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah alutsista laut China hingga 2016**

<b>Equipment</b>	<b>China</b>
Kapal Induk	1
Kapal selam/ <i>Submarines</i>	68
Kapal perusak / <i>Destroyer</i>	21
Fregat / <i>Frigate</i>	46
Korvet / <i>Corvette Strength</i>	19
Kapal patrol pantai / <i>Coastal Patrol Craft Strength</i>	368

## 2) Kekuatan Angkatan Laut Indonesia

Perubahan dan perkembangan Angkatan Laut di dunia dialami juga oleh Indonesia. Perubahan dan perkembangan tersebut terjadi seiring dengan perubahan lingkungan strategis, teknologi, kebijakan pertahanan, dan doktrin yang ada. Berdasar pada realitas yang ada dimana dilihat dari aspek geografis dan demografi, Indonesia sebenarnya memenuhi syarat untuk dapat digolongkan sebagai kekuatan regional (*regional power*). Akan tetapi tanpa didukung oleh kekuatan militer yang tangguh<sup>18</sup>, julukan tersebut menjadi kurang berarti mengingat elemen kekuatan militer

<sup>17</sup> Alutsista atau alat utama sistem pertahanan, yakni istilah untuk memaknai peralatan perang yang di dalamnya termasuk persenjataan perang dan kendaraan perang.

<sup>18</sup> Dalam negara modern ketangguhan militer suatu negara didasarkan atas kepemilikan dan akuisisi persenjataan yang lengkap dan canggih.

merupakan aspek penting dalam melihat peran negara sebagai kekuatan global atau kawasan saat ini

Kenyataan geografi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan keutamaan atas pengamanan diantaranya adalah: 1) pengamanan jalur laut yani Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); 2) pengamanan dari para pembajak dan perompak; 3) pengamanan wilayah laut terhadap tindakan-tindakan pencurian ikan dan kekayaan alam lainnya; 4) pengamanan wilayah laut terhadap segala bentuk penyeludupan; dan 5) pengamanan wilayah laut dan udara terhadap penggunaan jalur laut dan jalur Indonesia oleh pihak asing. Dan juga berdasar pada kenyataan geografik posisi Indonesia yang berada di jalan silang dunia atau letak Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional serta dilengkapi dengan kekayaan alam diseluruh perairan yang dimilikinya, terdapat beragang konsekuensi yang harus didapat kan oleh Indonesia. Tidak ada yang menjamin bahwa para pengguna *sea lanes of communication* atau SLOC seluruhnya adalah pengguna yang tertib atas aturan yang ada. Umumnya para pengguna SLOC adalah negara maritime yang kuat dan memiliki kekuatan laut yang lebih kuat dari yang dimiliki oleh TNI AL karenanya Indonesia terus memperkuat kekuatan militer beserta persenjataannya di perairan Indonesia untuk menghadapi konflik perairan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Proses modernisasi militer Indonesia telah dijalankan sejak tahun 2004 hingga saat ini dan telah menunjukkan peningkatan kekuatan militer Indonesia yang berarti. Alutsista TNI dapat dikatakan mengalami puncak kekuatannya pada tahun 2014 sebagai hasil dari belanja alutsista yang digalakkan pemerintah melalui program *Minimum Essential Force* (MEF) Restra I yang telah berlangsung dari tahun 2009 hingga 2014. Hasil belanja tersebut dapat dilihat dari keberadaan beberapa alutsista seperti Kapal perang KRI Bung Tomo Class, kapal patrol Maritim CN-234 MPA, dan yang lainnya.<sup>19</sup>

Peningkatan kekuatan militer terus mejadi perhatian penting pemerintah Indonesia terlebih pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh presiden Jokowi terdapat salah satu agenda modernisasi militer Indonesia yakni program *Minimum Essential Force* (MEF) Restra II yang berlangsung pada tahun 2015-2020. Indonesia melakukan penambahan kekuatan kapal selam dengan membeli 3 unit kapal selam DSME-209 atau yang sering disebut improved ChangBogo dari Korea Selatan dan direncanakan akan tiba pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Dengan demikian kapal selam Indonesia akan bertambah menjadi 5 unit Kapal Selam.<sup>20</sup>

Mengenai modernisasi militernya Indonesia tidak akan terbendung lagi. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan GDP yang juga tidak

---

<sup>19</sup> "Alutsista TNI Terbaru 2014" diakses dari [http://www.alutsista.net/read/7/Alutsista TNI Terbaru 2014](http://www.alutsista.net/read/7/Alutsista_TNI_Terbaru_2014) pada tanggal 17 Februari 2017

<sup>20</sup> "Militer Indonesia di tengah Konflik Laut China Selatan" diakses dari [http://www.militerindonesia.net/read/39/Militer Indonesia ditengah Konflik Luat China Selatan](http://www.militerindonesia.net/read/39/Militer_Indonesia_ditengah_Konflik_Luat_China_Selatan)

tertandingi di kawasan ini. Anggaran berbasis PDB yang mulai diterapkan pada tahun 2017 akan memastikan bahwa 3 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2016 anggaran militer Indonesia akan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah anggaran pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista menjadi sebesar Rp 120 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.<sup>21</sup>

Makna dari semua pertumbuhan dan pemekaran militer Indonesia karena indicator potensi yang dimiliki Indonesia tak tertandingi. Oleh sebab itu, Global Fire Power menempatkan Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat posisi ke 12 di dunia, dan peringkat pertama di ASEAN, serta mengungguli Australia.

Berikut adalah ringkasan Alutsista Angkatan Laut yang dimiliki oleh Indonesia:

---

<sup>21</sup> Anggraan di Atas Rp 100 Triliun, TNI Fokus Rawat Alutsista di akses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150702121437-20-63839anggaran-di-atas-rp-100-triliun-tni-fokus-rawat-alutsista/> pada tanggal 17 Februari 2017

**Tabel 4.3 Jumlah alutsista laut Indonesia hingga 2016**

<b>Equipment</b>	<b>Indonesia</b>
Kapal Induk	-
Kapal selam / <i>Submarines</i>	2
Kapal perusak / <i>Destroyer</i>	1
Fregat / <i>Frigate</i>	6
Korvet / <i>Corvette Strength</i>	23
Kapal patrol pantai / <i>Coastal Patrol Craft Strength</i>	70

Melihat pada jumlah kekuatan angkatan laut antara China dan Indonesia sebagaimana yang diuraikan di atas yakni dengan jumlah alutsista yang dimilikinya, kekuatan angkatan laut China jauh diatas Indonesia. Kekuatan China bahkan dapat menandingi kekuatan Amerika yang dikatakan sebagai negara *Super Power*. Tentunya dengan melihat pada kenyataan yang ada, China akan dengan mudah mengalahkan kapal perang milik Indonesia yang mengalami kekalahan dalam segi jumlah kekuatan alutsistanya.

## **B. Karakteristik Diplomasi China**

Karakter diplomasi China dalam konflik yang berlangsung dengan Indonesia di Perairan Natuna dapat dikatakan sebagai karakteristik diplomasi perompak dan masuk dalam kategori *Political piracy*. *Political piracy* sendiri merupakan perompakan yang dilaterbelakangi masalah politik yang mana aksi kejahatannya di laut bertujuan untuk mencapai kebutuhan yang akan memenuhi dan mendukung perjuangan yang berkaitan dengan politik. Beberapa unsur yang

disebutkan dalam pasal 101 UNCLOS 1982 dapat dilihat pada tindakan China di dalam konfliknya dengan Indonesia di Natuna yang menunjukkan dan menggolongkan tindakan China tersebut sebagai sebuah tindakan kejahatan di laut selayaknya yang dilakukan oleh para perompak. Beberapa unsur-unsur tersebut di antaranya adalah<sup>22</sup>:

1. Merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai hukum;

Dalam konflik di Laut Natuna, China didapati telah melanggar beberapa pasal dalam UNCLOS yakni;

- a. BAB V dan BAB VI UNCLOS 1982 terkait Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, dimana China dengan bukti-bukti yang telah ada menunjukkan telah melakukan pelanggaran dengan melintasi atau memasuki wilayah teritori Indonesia tanpa izin terlebih dahulu. Tindakan penerobosan masuk ke wilayah Indonesia tersebut dilanjutkan dengan melakukan tindakan kekerasan yang mana menghalangi jalannya kelancaran pelaksanaan penegakan hukum oleh Indonesia.

- b. BAB V pasal 73 UNCLOS 1982 terkait tindakan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara yang dalam konflik ini adalah Indonesia.

- c. Pasal 29 UNCLOS 1982 terkait lintas kapal perang yang juga terhubung dengan pasal-pasal dalam Bab V mengenai ketentuan

---

<sup>22</sup> Pasal 101 UNCLOS 1982

atas kegiatan yang dapat berlangsung di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif.

2. Tindakan yang bertujuan untuk kepentingan satu pihak.

China melakukan tindakan pencegahan dan menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa memperdulikan adanya aturan hukum internasional yang ada. Hal tersebut dikarenakan gencarnya untuk bertindak guna mencapai kepentingannya dimana agar tidak terjadinya penangkapan terhadap kapal nelayan China yang melakukan tindakan *illegal fishing*.

Penggolongan tindakan China di perairan Natuna kedalam aksi kejahatan di laut ala perompak dapat dilihat dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi aksi kejahatan seperti perompak di laut yang diantaranya adalah:

1. Situasi Ekonomi dan Kondisi Geografi di sekitar kawasan

Terkait factor ini, penulis telah menjelaskan dalam alasan pertama yakni mengenai kepentingan geopolitik yang berkaitan dengan letak wilayah atau geografi, sumber daya alam, dan juga *power* atau kekuatan militer.<sup>23</sup>

2. Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya.

Meski telah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum, namun China seolah “kebal” terhadap hukum yang ada. Tindakan *illegal fishing*

---

<sup>23</sup> Lihat pada alasan pertama mengenai geopolitik.

yang dilakukan oleh China di Indonesia merupakan tindakan yang dilakukan kesekian kali dan terus terulang. Hal tersebut dikarenakan tak banyak yang dapat dilakukan dari pihak Indonesia sendiri dan beberapakali melancarkan sikap yang tidak tegas dengan terus memberikan peringatan tanpa melakukan pengamanan. Hal tersebut berlangsung hingga pada masa menjabatnya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.

Selain itu, konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982 juga tidak banyak melakukan tindakan hukum atau pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh China. Tidak hanya tindakan China di laut Indonesia, tetapi juga dapat dilihat dari penegakan hukum yang terjadi atas tindakan China di Laut China yang konfliknya telah lebih dulu ada. Dikarenakan tidak adanya yang dengan tegas “menghukum” China menyebabkan China tidak pernah jera untuk melakukan pelanggaran hukum bahkan kian berani dengan terang-terangan melanggar hukum besar sekalipun.